



Representasi Perempuan dalam Kepemimpinan Eksekutif Lokal: Analisis Teori Hanna Pitkin pada Kepala Daerah Perempuan di Banten

Anisa Ayu Aprianti

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Siti Nurlita

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Ika Arinia Indriyany

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Alamat Kampus: Jl. Raya Palka No.Km.3, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kota Serang,
Banten 42163

Korespondensi penulis: 6670230026@untirta.ac.id

Abstract. *The increase in the number of women in political positions is often considered an indicator of progress in democracy and gender equality. However, this increase does not always reflect the presence of policies that truly favor women's interests. This study analyzes the representation of women in local executive leadership in Banten Province using Hanna Pitkin's theory of representation, particularly the relationship between descriptive representation and substantive representation. This study uses a qualitative approach with a literature review method of various academic sources and relevant policy documents. The results of the analysis show that the increase in the number of female regional heads in Banten has not been fully accompanied by public policies that are responsive to women's issues. In some cases, the emergence of female leaders is also influenced by family networks or political elites, thereby potentially maintaining the existing power structure. These findings indicate that the presence of women in executive positions does not automatically result in substantive representation. Therefore, increasing women's representation needs to be accompanied by changes in political structures and policy commitments that are more responsive to women's interests.*

Keywords: *Representation; Local Leadership; Gender Politics.*

Abstrak. Peningkatan jumlah perempuan dalam jabatan politik sering dianggap sebagai indikator kemajuan demokrasi dan kesetaraan gender. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu mencerminkan hadirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan perempuan. Penelitian ini menganalisis representasi perempuan dalam kepemimpinan eksekutif lokal di Provinsi Banten dengan menggunakan teori representasi Hanna Pitkin, khususnya pada hubungan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber akademik dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kepala daerah perempuan di Banten belum sepenuhnya diikuti oleh kebijakan publik yang responsif terhadap isu-isu perempuan. Dalam beberapa kasus, kemunculan pemimpin perempuan juga dipengaruhi oleh jaringan keluarga atau elite politik, sehingga berpotensi mempertahankan struktur kekuasaan yang sudah ada. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam jabatan eksekutif tidak secara otomatis menghasilkan representasi substantif. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan perlu diiringi dengan perubahan dalam struktur politik dan komitmen kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan perempuan.

Kata kunci: Representasi; Kepemimpinan Lokal; Politik Gender

LATAR BELAKANG

Visualisasi dari kakunya ruang politik bagi perempuan ialah dengan pendominasian laki-laki, di dalam berbagai tubuh pemerintahan baik pada level lokal maupun level nasional (Kontu & Pesak, 2025). Isu representasi perempuan dalam politik secara empiris menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Namun kehadiran perempuan dalam jabatan publik dipandang hanya sebagai pelengkap, bukan lagi sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketimpangan historis dalam distribusi kekuasaan. Hadirnya stigma gender akses terbatas terhadap sumber daya politik, serta beban ganda dalam kehidupan sosial serta politik turut mempersempit peluang perempuan untuk maju sebagai pemimpin.

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam ruang politik bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya minat atau kompetensi perempuan dalam politik, melainkan akibat dari berbagai hambatan struktural, kultural, dan institusional yang masih mengakar. Keikutsertaan perempuan dalam struktur pemerintahan mampu diawali dengan keterlibatan diri didalam proses politik, hal tersebut di representasikan melalui pengalokasian kuota 30% bagi perempuan (Mayrudin et al., 2022; Mayrudin et al., 2023).

Kebijakan tersebut termaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Faktualnya kebijakan ini secara normatif ditujukan guna membuka akses politik yang lebih luas bagi perempuan dan memperkuat demokrasi yang

inklusif. Dimana perempuan mampu terlibat secara aktif dalam rangkaian perumusan dan pengambilan kebijakan. Jika merujuk kedalam pembahasan politik lokal, di daerah Banten sendiri keterwakilan perempuan menjadi pembahasan yang menarik karena banyak aktivis perempuan lahir dari proses politik. Narasi tersebut dibuktikan secara empiris bahwasannya Banten juga merupakan daerah dengan partisipasi perempuan di eksekutif tertinggi (Mayrudin, et al.,2023). Akan tetapi dalam praktiknya, keterlibatan perempuan didalam sektor pemerintahan daerah lainnya masih menunjukkan angka yang rendah.

BANTEN	14,00
PANDEGLANG	20,00
LEBAK	14,00
TANGERANG	20,00
SERANG	12,00
KOTA TANGERANG	12,00
KOTA CILEGON	10,00
KOTA SERANG	8,89
KOTA TANGERANG SELATAN	26,00

Gambar 1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasannya keterwakilan perempuan di berbagai daerah Banten memang masih memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Di sisi lain, beberapa periode saat pemilihan kepala daerah tercatat kemunculan sejumlah perempuan yang berhasil menduduki posisi kepemimpinan eksekutif baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Secara deskriptif, kondisi ini sering dipandang sebagai tanda hadirnya kemajuan demokrasi lokal dan keberhasilan membuka ruang partisipasi politik bagi perempuan (Jayani et al, 2024). Akan tetapi dalam representasinya, keterwakilan perempuan tidak berhenti pada persoalan jumlah atau kehadiran semata. Karena dalam realitas yang lebih kompleks, kehadiran perempuan dalam posisi strategis sekalipun belum tentu secara otomatis mampu melahirkan kebijakan yang responsif bagi kepentingan perempuan lainnya.

Fenomena demikian dapat tervisualisasikan dalam dinamika politik lokal di Banten, dimana memungkinkan terjadinya kesenjangan dalam merepresentasikan kepentingan perempuan baik secara substantif atau pun simbolik. Problematika dirkus politik lokal dapat ditinjau dalam perspektif bagaimana para wakil eksekutif perempuan dapat lahir

dan menguasai kursi kekuasaan. Karena faktualnya sebagian besar kepala daerah perempuan lahir dari jaringan kekuasaan keluarga atau elite politik yang sudah mapan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasannya pemenuhan kuota 30% di tingkat eksekutif tidak didasarkan oleh sistem meritokrasi karena dalam prosesnya diwarnai oleh praktik patronase dan dinasti politik.

Dalam mengkaji fenomena representasi politik Perempuan yang menggunakan teori Hanna Pitkin dalam tulisannya "*The Concept of Representation*". Teori ini menjadi landasan penting dalam memahami konotasi keterwakilan perempuan dalam kancah politik. Dimana Pitkin menekankan pada makna keterwakilan bukan sekedar pada hadirnya perempuan yang mengisi jabatan tertentu dalam politik (Pitkin, 1967). Artinya Pitkin melihat representasi sebagai konsep seseorang yang mewakili orang lain. Ketika perempuan dalam politik, mereka hadir bukan hanya sebagai instrumen bahwa negara kita telah menjalankan amanat yang sesuai dengan kebijakan 30% bagi perempuan dalam berpolitik (Parawansa, 2022). Keterwakilan perempuan hanya menjadi simbolik semata tentang kesetaraan gender maupun maksud yang lainnya. Karena itu, untuk memahaminya Pitkin membagi beberapa jenis representasi.

Pitkin membagi empat bentuk representasi, seperti formal, deskriptif, simbolik dan substantif. Bentuk representasi formal yang dilihat pada keterwakilan perempuan melalui legitimasi secara prosedural (Pitkin, 1967). Jika di Indonesia, mereka masuk dalam politik dan menduduki jabatan politik melalui pemilihan umum sebagai wujud dari demokrasi. Bentuk representasi ini dilihat seakan-akan mereka hadir benar-benar mewakili orang yang memilihnya dalam pemilu itu. Sehingga mereka dianggap memiliki mandat untuk mewakili rakyat.

Representasi deskriptif melihat pada mereka mewakilkan orang-orang yang memiliki kesamaan pada karakteristik sosial dengan orang yang diwakili (Pitkin, 1967). Untuk memudahkan memahami bentuk ini, biasanya dilihat pada kesamaan gender, ras, suku, etnis, agama dan status sosial. Representasi substantif adalah yang mewakilkan benar-benar bertindak untuk kepentingan yang diwakili (Pitkin, 1967). Bentuk representasi ini tidak berfokus pada siapa yang diwakili, melainkan bertindak pada apa yang bisa ia lakukan secara politik.

Bentuk representasi simbolik merujuk pada yang mewakili dianggap sebagai simbol. Dimana hubungan yang terjalin tidak berdasarkan pada kesamaan kepentingan dan karakteristik sosial, melainkan pada pendekatan psikologis (Pitkin, 1967). Biasanya

mereka memiliki simbol dengan makna tertentu untuk lebih dekat dengan yang diwakilinya. Dari penjelasan empat bentuk representasi inilah yang akan digunakan penulis untuk memahami pola yang terjadi di Provinsi Banten (Fitrianti, et al, 2023). Dengan memfokuskan pada representasi Perempuan dalam eksekutif seperti Kepala Daerah.



Gambar 2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Banten Tahun 2024

Data pada gambar tersebut memperkuat bahwasannya isu-isu terkait pemenuhan kebutuhan perempuan di Banten masih menunjukkan angka yang minim. Secara nominal memang terjadi penurunan sebesar 0,011 point (BPS, 2025), akan tetapi penurunan tersebut tidak berimplikasi secara dominan dalam upaya peningkatan kesetaraan. Problematika ini mampu hadir dari ketidakseimbangan pada struktur birokrasi, dinamika politik lokal, prioritas pembangunan daerah, hingga tekanan partai politik yang memengaruhi arah kebijakan. Sehingga hasilnya kualitas kebijakan yang hadir tidak linear dengan kebutuhan perempuan, karena justru kondisi tersebut mampu melahirkan isu gender yang lebih kronis.

Dengan demikian, peningkatan jumlah perempuan dalam kepemimpinan eksekutif lokal di Banten perlu dianalisis secara holistik. Karena dalam kerangka representasi perempuan yang ditinjau bukan hanya mengenai seberapa banyak perempuan yang berhasil menduduki jabatan kepala daerah, tetapi juga mengenai sejauh mana kehadiran mereka mampu mendorong transformasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender. Penelitian ini sendiri ditujukan guna menelisik mengenai sejauh mana peningkatan angka kepemimpinan perempuan benar-benar berkontribusi pada

transformasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif, atau justru masih terjebak dalam logika simbolik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus ala Creswell, guna menelisik secara holistik mengenai representasi perempuan didalam kepemimpinan eksekutif di Banten. Kerangka teori Representasi Hanna Pitkin menjadi pisau analisa yang mampu membedah representasi perempuan dalam tubuh pemerintahan di Banten melalui indikator-indikator teorinya. Karyanya yang tertuang dalam *The Concept of Representation* (1967) tersebut menawarkan analisis konseptual mengenai arti representasi politik secara komprehensif. Menurut Pitkin, representasi tidak cukup dipahami sebagai hubungan legal atau administratif semata. Ia menyatakan bahwa representasi adalah proses kompleks yang mencakup tindakan, hubungan, dan tanggung jawab antara wakil dan yang diwakili (Pitkin, 1967).

Sehingga teori yang dielaborasi dengan *coding* studi kasus diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang komprehensif. Data dari penelitian ini bertumpu pada studi literatur, yang memanfaatkan berbagai karya ilmiah, buku, hingga media informasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Representasi Deskriptif Perempuan di Banten

Perkembangan desentralisasi turut membentuk dan membangun politik lokal. Karena desentralisasi sebagai mekanisme institusional yang memberikan Sebagian kewenangan pemerintah pusat ke Tingkat daerah. Dengan demikian, desentralisasi menjadi instrumen untuk elit lokal berusaha memperebutkan, menggunakan dan mempertahankan kekuasaannya di Tingkat lokal (Barriyah, 2023). Dalam hegemoni yang luas, tantangan Perempuan dalam menjadi seorang pemimpin tidak lain adalah budaya diskriminasi. Stigma yang mengakar bahwa pemimpin Perempuan masih terbatas pada urusan domestic.

Pada ranah eksekutif, Banten sebagai salah satu provinsi dengan kepemimpinan eksekutif Perempuan cukup signifikan. Kepala Daerah Perempuan seperti Gubernur dan Bupati Perempuan pertama kali oleh Ratu Atut Chosiyah pada 2005 sebagai Gubernur Banten (Fauziah, et al, 2023). Keberhasilan Atut menjadi Kepala Daerah perempuan pertama turut menciptakan semangat serta harapan baru bagi Perempuan lainnya. Atut

mengawali karirnya dalam dunia politik melalui partai Golongan Karya (Golkar). Seperti yang diketahui, bahwa Golkar merupakan satu-satunya partai besar di masa pemerintahan orde baru. Sehingga saat pengusungan Atut sebagai calon Gubernur oleh partai Golkar, cukup mudah untuk memenangkan pemilu di Tingkat lokal. Selain itu, terdapat dorongan yang kuat dari ayahnya H. Tubagus Chasan Sohib sebagai salah satu tokoh kunci pemekeraan Banten sebagai provinsi yang terpisah dari Jawa Barat (Nursaid, 2022).

Abah Hasan juga memiliki posisi yang strategis di Golkar, sehingga bisa merekomendasikan Atut menjadi Wakil Gubernur pada 2002 dan melanjutkan Gubernur di 2005. Ayahnya sebagai figur tokoh sentral yang sangat disegani Masyarakat saat itu. Sehingga keberhasilan Atut tidak lepas dari dorongan sang ayah untuk meletakkan keluarganya pada posisi politik lokal di Banten (Sulistiani & Indriany, 2024). Kemudian Atut membangun jaringan kekuasaan yang kuat dengan menempatkan anggota keluarganya di Tingkat eksekutif dan legislatif. Kepemimpinan Perempuan selanjutnya Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Kabupaten Lebak. Iti mengawali karir politiknya di legislatif (anggota DPR RI) dari fraksi Demokrat pada 2009. Iti juga menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten dari partainya sendiri, hal ini memudahkan Iti memiliki control penuh atas mesin partai di Banten. Berakhirnya masa keanggotaan DPR, Iti berhasil menjadi Bupati Lebak pada 2014, menggantikan Bupati sebelumnya yaitu Mulyadi Jayabaya (2003 – 2013) yakni ayahnya sendiri.

Keberhasilan Iti menjadi Bupati ternyata tidak lepas dari peran ayahnya yang memiliki figur “Bapak Lebak”. Ia juga turut menempatkan anggota keluarganya pada posisi politik yang strategis. Sehingga sejak 2003 sampai 2019, Lebak dipimpin oleh Bupati keluarga Jayabaya dengan masing-masing dua periode. Kabupaten Pandeglang turut menyumbang dua orang kepemimpinan Perempuan, Irna Narulita (2016 – 2025) dan Raden Dewi Setiani (2025 – 2030). Keduanya sama-sama mengawali karir politik pada Tingkat birokrat sebelum akhirnya Irna menggantikan Bupati Dimiyati Natakusumah, suaminya sendiri. Kemenangan Irna selama dua periode ini, tidak lepas dari peran tokoh sentral politik Dimiyati di Pandeglang (Nursaid, 2022). Berakhirnya kepemimpinan Dimiyati dan Irna (suami – istri) dalam kepemimpinan di Pandeglang, tidak menyurutkan

semangatnya. Kemenangan Irna yang dikenal sebagai adik kandung Dimiyati telah membuktikan arus politik lokal Dimiyati yang menguasai Pandeglang sejak 2000 – 2030.

Kehadiran Airin sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (2011 – 2021) yang mengawali karir politiknya langsung di ranah eksekutif. Meski demikian, Airin merupakan adik ipar dari Ratu Atut yang Dimana masih tergabung dalam keluarga Chasan Sohib. Kepemimpinan Perempuan lainnya adalah Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah (2016 – 2025). Ia mengawali karir politiknya sebagai Wakil Bupati Serang pada 2010. Kemudian di tingkat legislative sebagai pimpinan partai Golkar provinsi Banten pada 2013. Sampai akhirnya menjadi Bupati Serang selama dua periode. Meskipun Tatu Chasanah mengawali karirnya dari Tingkat eksekutif dan legislative, tetap saja ia masih menjadi bagian dari keluarga Chasan Sohib sebagai adiknya Atut. Sehingga keberhasilannya selain dari jaringan yang ia bangun sendiri, peran sentral keluarganya juga mempengaruhi (Nursaid, 2020).

Kepemimpinan Perempuan yang terakhir adalah Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah periode 2025 – 2030. Kemenangannya turut menggeserkan dominasi keluarga Atut. Ia mengawali karirnya dalam aspek keagamaan sebagai tokoh organisasi Perempuan (Ketua Fatayat NU Kabupaten Serang). Sehingga keberhasilannya merupakan hasil dari kepemimpinan berbasis organisasi massa tanpa harus memiliki pertalian dengan keluarga penguasa sebelumnya (Nasrudin, et al, 2025). Kendati demikian, ia mendapatkan dukungan dari suaminya Yandri sebagai politisi senior PAN dan Menteri di kabinet Presiden Prabowo. Dalam perspektif representasi Hanna Pitkin, kepemimpinan perempuan di Banten merupakan kemenangan representasi deskriptif secara komposisi gender, namun kehadirannya sering kali lebih mencerminkan perpanjangan kekuasaan dinasti dan elit organisasi daripada murni mewakili aspirasi serta pengalaman hidup perempuan akar rumput.

Representasi Formal Kepala Daerah Perempuan di Banten

Dalam perspektif representasi formal Hanna Pitkin, kehadiran pemimpin perempuan di Banten secara prosedural telah berjalan melalui mekanisme pemilihan umum (kepala daerah) yang sah, Tokoh-tokoh seperti Ratu Atut hingga Ratu Rachmatuzakiyah meraih otoritas melalui mandat suara rakyat (Remanu, et al, 2025).

Namun, otoritas formal ini secara kritis sering kali lahir bukan dari kompetisi terbuka yang setara, melainkan hasil dari desain politik pintu tertutup di internal partai yang memberikan karpet merah kepada perempuan dari lingkaran dinasti atau elit organisasi besar untuk mengamankan suksesi kekuasaan. Mekanisme seleksi internal partai politik seperti Golkar dan Demokrat di Banten cenderung eksklusif bagi lingkaran keluarga (dinasti) demi menjaga hegemoni kekuasaan dan sumber daya. Akibatnya, representasi formal perempuan lahir dari restu elit partai, bukan hasil kaderisasi akar rumput yang kompetitif. Karena partai politik memegang peran penting dalam pengusungan calon kepala daerah.

Proses penguatan representasi formal ini pada akhirnya menciptakan paradoks, dimana jabatan kepala daerah perempuan di Banten lebih berfungsi sebagai instrumen legalitas untuk menjaga keberlangsungan pengaruh keluarga maupun kelompok tertentu (seperti keluarga Chasan Sohib, Jayabaya dan Natakusumah). Meskipun secara aturan mereka dipilih rakyat melalui pemilihan umum dan mereka mengikuti setiap prosedurnya seperti pencalonan, kampanye hingga pemilihan (Rustamana, et al, 2025). Namun otoritas yang mereka miliki cenderung bersifat "mandat titipan" dari struktur kekuasaan di belakangnya, sehingga legitimasi formal tersebut sering kali gagal bertransformasi menjadi kemandirian politik yang murni membela kepentingan perempuan secara substantif.

Representasi substantif dalam kepemimpinan perempuan di Banten

Kajian mengenai representasi perempuan dalam kepemimpinan eksekutif lokal tidak hanya berbicara tentang kesetaraan dalam akses kekuasaan, tetapi juga mengenai bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial yang lebih luas. Pada dasarnya representasi perempuan bukan hanya sekedar jumlah atau keberadaan perempuan dalam jabatan eksekutif, tetapi juga sejauh mana kualitas kebijakan dan orientasi kepemimpinan yang dihasilkan (Pitkin, 1967). Dalam analisis kekuasaan eksekutif lokal di Banten memvisualisasikan tingginya angka keterwakilan perempuan di dalam tubuh pemerintahan, dimana peningkatan jumlah perempuan dalam kepemimpinan eksekutif dapat memperkuat legitimasi demokrasi karena menunjukkan adanya inklusivitas dalam akses kekuasaan.

Kerangka teori representasi ala Hanna Pitkin menjabarkan bahwasannya keterwakilan secara substantif tidak hanya sebatas angka melainkan sejauh mana seorang pemimpin mampu untuk bertindak untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya secara aktif. Kajian lokal mengenai representasi substantif perempuan pada ranah eksekutif di Banten dibalut dengan orientasi komitmen para wakil dalam menentukan dan membentuk kebijakan terkait kesetaraan gender dalam proses pembangunan. Dalam representasi substantif sendiri faktualnya yang diwakili tidak hanya bergantung pada identitas pemimpin, tetapi juga pada berbagai faktor institusional dan struktural yang memengaruhi proses pengambilan kebijakan karena institusional tersebut menjadi tempat dijalankan kepemimpinan sang wakil.

Tabel 1. Pemimpin Perempuan Di Wilayah Banten

Tokoh	Wilayah Kepemimpinan
Ratu Atut	Provinsi Banten
Airin Rachmi Diany	Kota Tangerang Selatan
Ratu Tatu	Kabupaten Serang
Iti Jaya Baya	Kabupaten Lebak
Irna Narulita	Kabupaten Pandeglang
Intan Nurul Hikmah	Kabupaten Tangerang
Ratu Rachmatu Zakiyah	Kabupaten Serang

Data keterwakilan perempuan dalam tatanan eksekutif di Banten menghadirkan harapan besar atas representasi substantif yang dijalankan. Akan tetapi dalam kondisi faktualnya hingga saat ini representasi para wakil perempuan masih dipertanyakan dalam tatanan politik hingga sosial. Di mana dalam keberlangsungan kepemimpinannya masih minim atas kebijakan yang mengutamakan isu-isu perempuan. Hal ini tergambar dengan lahirnya berbagai komunitas hingga gerakan-gerakan perempuan lainnya untuk tetap bersuara akan hak dari para perempuan. Secara empirisnya jika kebijakan yang hadir pada tatanan lokal di Banten telah melindungi serta mewakili para perempuan maka

seharusnya gerakan sosial dan kelompok perempuan tidak lagi menjadi payung lindung utama bagi para perempuan.

Gagalnya representasi substantif dapat tercerminkan dalam kepemimpinan Ratu Atut, dimana seharusnya sebagai pemimpin perempuan pertama mampu memberikan terobosan terbaru mengenai kesetaraan gender. Namun secara empiriknya beliau tersandung kasus korupsi. Jejak hitam yang telah ditinggalkan oleh Ratu Atut tidak membuat gurita kekuasaannya melemah, karena kedudukannya masih terus dilanggengkan hingga saat ini melalui dinastinya.

Pada dimensi yang lain, gerakan-gerakan perempuan tetap perlu dilacak karena posisi mereka apakah benar sebagai bentuk representasi kepentingan perempuan atau hanya sebatas gerakan akar rumput yang bersifat elitis semata (Ramadhan & Indriany, 2022). Berdasarkan beberapa data yang disajikan media informasi, bahwasannya Banten telah bersinergi dalam menghadirkan kebijakan yang ramah akan kesetaraan, hal ini diperkuat dengan status provinsi Banten yang mendapatkan anugerah Parahita Ekapraya pada tahun 2023 (PPID, 2023). Namun dalam capaian tersebut tidak menunjukkan secara langsung bagaimana para wakil perempuan menyokong hadirnya kesetaraan itu.

Isu-isu terkait kesetaraan gender tetap menjadi perbincangan yang panas, ditengah budaya sosial dan politik yang terlalu maskulinitas. Dimana perlindungan bagi para buruh wanita pun masih terdengar, problematika kekerasan seksual yang semakin meningkat. Kondisi tersebut semakin menggabarkan minimnya kebijakan yang mengatur hak serta kepentingan perempuan. Dalam perspektif normatif berbagai kebutuhan mengenai kesetaraan gender telah dibentuk, namun secara faktualnya implementasinya masih sangat lemah.

Dengan demikian representasi perempuan didalam tubuh politik di Banten hanya bersifat kuantitatif, artinya mereka hadir sebagai formalitas belaka yang hanya untuk merepresentasikan kepentingan pribadi tanpa perlu terlibat aktif dalam pemenuhan kebutuhan yang diwakili. Karena berdasarkan kerangka konseptual, substantif tidak hanya diukur dari keberagaman identitas pemimpin tetapi juga dari kemampuan

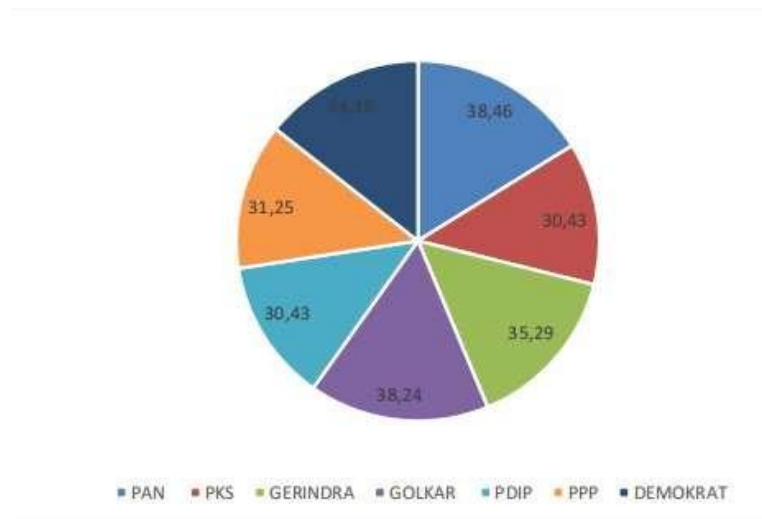
pemimpin tersebut dalam memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya melalui tindakan dan kebijakan yang nyata.

Representasi Deskriptif Dalam Kepemimpinan Lokal

Kehadiran perempuan sebagai kepala daerah menandai adanya peluang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah. Secara deskriptif, kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi sepenuhnya berada di pinggiran struktur kekuasaan, melainkan telah mampu menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah. Jika dilihat dari perspektif representasi deskriptif, kehadiran kepala daerah perempuan dapat dipahami sebagai bentuk kesamaan identitas antara pemimpin dengan sebagian masyarakat yang diwakilinya, yaitu perempuan.

Kesamaan identitas ini sering kali dianggap dapat membawa perspektif yang berbeda dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan perempuan. Dengan demikian, keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan eksekutif diharapkan dapat membuka ruang bagi munculnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Namun dalam kerangka representasi deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh Hanna Pitkin, kehadiran perempuan dalam jabatan kepala daerah tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kebijakan yang berpihak pada perempuan (Pitkin, 1967).

Representasi deskriptif lebih berfokus pada bagaimana perempuan mampu hadir didalam kelembagaan, artinya perempuan dihadirkan guna memenuhi representasi secara kuantitatif. Berbeda dengan substantif yang condong pada tindakan politik yang diambil oleh pemimpin (yang mewakili), khususnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan kelompok yang diwakili. Sesuai kerangka konsepnya, kepala daerah perempuan diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dan sosial. Terlebih lagi secara substantif Banten memiliki keterwakilan perempuan di eksekutif tertinggi (Mayrudin et al, 2023).



Gambar 3. Detail Pemutakhiran Partai Politik

Data yang memvisualisasikan keterwakilan perempuan di Banten melalui lembaga politik yaitu partai, menunjukkan persentase yang cukup stabil. Fenomena ini memang mencerminkan adanya pergeseran dalam struktur representasi politik. Namun, jika dianalisis lebih mendalam menggunakan pendekatan Pitkin, peningkatan jumlah tersebut belum tentu secara otomatis menghasilkan representasi (substansif) bagi kepentingan perempuan secara luas.

KESIMPULAN

Isu representasi perempuan dalam politik secara empiris menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Namun kehadiran perempuan dalam jabatan publik dipandang hanya sebagai pelengkap, bukan lagi sebagai bagian dari upaya memperbaiki ketimpangan historis dalam distribusi kekuasaan Hukum yang secara normatif hadir dalam proses represents pada faktualnya tidak mampu menjai barometer atas terpenuhnya kesetaraan. Dalam teorinya Hanna Pitkin, melihat representasi sebagai konsep seseorang yang mewakili orang lain. Kemudian Pittkin membagi empat bentuk representasi seperti deksipritf, formal, substansif dan simbolik. Dalam berbagai case kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan di Banten merupakan kemenangan representasi deskriptif secara komposisi gender, namun kehadirannya sering kali lebih

mencerminkan perpanjangan kekuasaan dinasti dan elit organisasi daripada murni mewakili aspirasi serta pengalaman hidup perempuan akar rumput. Seperti kepemimpinan di Banten hanya berpusat pada keluarga Chasan Sohib, Jayabaya dan Dimiyati.

Dalam perspektif representasi formal Hanna Pitkin, kehadiran pemimpin perempuan di Banten secara prosedural telah berjalan melalui mekanisme pemilihan umum (kepala daerah) yang sah. Namun, otoritas formal ini secara kritis sering kali lahir bukan dari kompetisi terbuka yang setara, melainkan hasil dari desain politik pintu tertutup sehingga jabatan kepala daerah perempuan di Banten lebih berfungsi sebagai instrumen legalitas untuk menjaga keberlangsungan pengaruh keluarga. Ditinjau dalam analisis representasi perempuan didalam tubuh politik di Banten hanya bersifat kuantitatif, artinya mereka hadir sebagai formalitas belaka yang hanya untuk merepresentasikan kepentingan pribadi tanpa perlu terlibat aktif dalam pemenuhan kebutuhan yang diwakili. Sehingga indikator dari proses representasi substantif tidak terpenuhi. Sehingga artinya perempuan dihadirkan guna memenuhi representasi secara kuantitatif (deskriptif). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi sepenuhnya berada di pinggiran struktur kekuasaan, melainkan telah mampu menempati posisi strategis dalam pemerintahan daerah namun kebijakan yang merepresentasikan kesetaraan masih minim di implementasikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, penulis menyampaikan apresiasi kepada informan yang bersumber dari berbagai bahan literatur. Sehingga penulis mampu mendapatkan informasi dan wawasan berharga terkait Representasi perempuan dalam ranah lokal di wilayah Banten. Tak hanya itu penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam atas selesainya penyusunan penelitian ini, yang tak luput juga dari kerjasama antar penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Arawi, F. A. (2022). Perbandingan representasi perempuan di parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 74-85.

- Aulia, Z., Syahmi, M., Habibie, G. L., Jauzi, R. A., Anwar, A., Fajri, H., & Elsi, S. D. (2026). Dinamika dan Prospek Representasi Politik Generasi Z dalam Keterwakilan Kursi Legislatif. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 692-701.
- Barriyah, I. Q. (2023). Representasi Perempuan Masa Kini Tubuh, Konsumerisme, Dan Metafora. *Perempuan, Seni & Dirinya*, 2, 111.
- Batubara, A. I. (2025). Kesenjangan Representasi Politik Perempuan: Analisis Gender di Tingkat Desa dan Kota. *Nizamayah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin*, 1(3), 185-199.
- Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 12-22.
- Fatharani, A., Hakim, L., & Putri, L. D. M. (2025). Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 7795-7804.
- Fitrianti, R., Rahayu, L. F., & Saepudin, E. A. (2023). Gender perceptions in political speech: women and political style. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 222-229.
- Parawansa, K. I. (2022). Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. *Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41-52.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation (1st ed.)*. University of California Press. <https://doi.org/10.2307/jj.2711645>.
- Putro, S. W. Kesetaraan Gender dalam Politik: Analisis Hambatan dan Strategi Peningkatan Representasi Perempuan di Lembaga Legislatif.
- Jayani, P. H., Shafira, F. M., Anindya, S., & Ummah, A. (2024). Representasi Gender Di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Politik. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(8), 37-45.
- Munggaran, T. P. (2023). Peran Dan Pengaruh Perempuan Dalam Dinamikapolitik Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7).
- Nasrudin, R., Solihah, R., & Aziz, Y. M. (2025). Women's Representation in Regional Elections: Gendered Institutions' Perspective on Political Design and Practice. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 6(2), 101-115.
- Nursaid, D. (2022). Evolusi dan Devusi Kebudayaan dalam Dinasti Atut di Banten. *Kusa Lawa*, 2(2), 51-60.
- Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M. A., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme Politik Kaum Perempuan dalam Partai Politik: Studi Fenomenologi pada Politisi Perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*, 4(2), 137-151.
- Rahayu, D., & Indriyany, I. A. (2022). Potret Perbandingan Representasi Kepemimpinan Kepala Daerah Airin Rachmi Diany dan Iti Octavia Jayabaya (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik).
- Remanu, AJK, Ramadhani, NA, Dewi, TR, Azzahra, AJ, & Ridwan, R. (2025). Dampak Dinasti Politik Terhadap Demokrasi Lokal: Kekuasaan Politik Keluarga Ratu Atut Di Provinsi Banten. *Jurnal Pemerintahan (Studi Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 10 (2), 1-18.
- Rustamana, A., Trisnadi, A., Agnia, AS, Fadhila, NA, Nazwa, N., & Ramadhani, OC (2025). Pembentukan Provinsi Banten: Dinamika Pemerintahan, Munculnya Dinasti Politik, dan Hegemoni Kekuasaan dari Era Reformasi hingga Kontemporer. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Terkini*, 5 (3), 4731-4736.
- Sitompul, H., Ginting, B. C., Pelawi, E. R. A. B., Ramadhan, I. U., Ramadhan, S. A. P.,

- Anadea, S., ... & Annisa, S. (2025). Dominasi Laki-Laki Dalam Politik Indonesia: Hambatan Menuju Ketercapaian Representasi Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(5), 541-556.
- Sulistiani, S., & Indriyany, I. A. (2024). Gender and social construction in local government: A experience from regent of Lebak Regency, Indonesia. *Government & Resilience*, 2(1), 58-72.
- Ramadhan, G., & Indriyany, I. A. (2022). Potret Representasi Gerakan Perempuan Dalam Mendorong Ketahanan Pangan Di Provinsi Banten. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 7(2), 43-58.
- Mayrudin, Y. M. A., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik. *Ijd-Demos*. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Keterlibatan Perempuan di Parlemen. Diakses pada 6 Maret 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html>.
- Komisi Pemilihan Umum. (2025). Detail Pemutakhiran Partai Politik. Diakses Pada 8 Maret 2026, dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Detail_parpol/detail_parpol/13.
- Mayrudin, Y. M. A., Utami, W. K., & Irawan, P. (2023). Dinamika Politik Catch-all atas Eksistensi Perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten. *Jurnal Transformatif*, 9(2), 127-145.
- Kontu, F., & Pesak, S. (2025). Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia. *Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(1), 64-73.
- Badan Pusat Statistik Banten. (2025). Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Banten Tahun 2024. Diakses Pada 6 Maret 2026, dari <https://banten.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/870/indeks-ketimpangan-gender--ikg--provinsi-banten-tahun-2024.html>.